

## **Book Review: Stigma Radikalisme Keagamaan**

*Zainuddin Fananie, Atiqa Sabardila, Dwi Purwanto, Radikalisme Keagamaan & Perubahan Sosial, Surakarta: Muhammadiyah University Press dan The Asia Foundation, 2002, 245+vii halaman. ISBN 979-95622-3-6. Harga Rp. 27.500,00*

*Oleh : Gini Pratigina\**

Dalam buku ini, aktivitas kelompok radikal keagamaan (KRK) dijelaskan dalam *setting* sosial-politik transisional Indonesia pasca-Suharto di Kota Surakarta. Munculnya kelompok radikalisme keagamaan di Indonesia, menurut para penulis buku ini, sudah muncul sejak masa kolonial Hindia Belanda, yang inti perjuangannya adalah gerakan anti kolonial, seperti Perang Padri (1830-1837), Perang Diponegoro (1825-1830). Di masa kemerdekaan kelompok radikal ini antara lain gerakan Darul Islam (hal. 14). Demikian pula dengan Kota Surakarta, yang memiliki akar historis gerakan radikal sejak masa kolonial. Pada masa kolonial Hindia Belanda, Surakarta merupakan gudang aktivis pergerakan, mulai dari basis gerakan Islam seperti Sarekat Islam, maupun gerakan komunis setelah muncul propagandis PKI/SI Merah Misbach.

Kelompok radikal keagamaan (KRK) di Surakarta yang menjadi sampel dalam buku ini adalah Majelis Ta'lim Al-Ishlah, Front Pembela Islam Surakarta (FPIS), Barisan Bismillah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Brigade Hizbullah, Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), Laskar Hizbullah Sunan Bonang, Laskar *Jundullah*, dan Laskar Jihad *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Tidak terdapat alasan yang jelas mengenai pemilihan sampel KRK tersebut, selain karena kelompok-kelompok tersebutlah yang tampak menonjol.

Perhatian aktivitas KRK sangat beragam, mulai dari persoalan moral sampai dengan politik nasional dan internasional. Dalam soal moral, misalnya, maraknya bentuk-bentuk perjudian dan prostitusi yang dianggap menjadi ajang kemaksiatan, telah menjadi perhatian bersama KRK. Kasus *sweeping* terhadap tempat-tempat hiburan dan kafe-kafe, adalah contoh lainnya untuk menghapus kemaksiatan. Tindakan tidak tegas pihak aparat kepolisian menangani persoalan kemaksiatan, membuat mereka melakukan tindakan sendiri, sehingga pada taraf tertentu menimbulkan perasaan takut dan cemas pada kelompok masyarakat lainnya.

---

\* Peminat Kajian Lintas Disiplin & Alumnus Universitas Islam Bandung

Terhadap persoalan politik nasional, perhatian KRK antara lain ditujukan pada masalah konflik Ambon dan Poso yang dianggap tidak diselesaikan secara tegas dan cepat oleh pemerintah. Krisis ekonomi dan politik juga menjadi momentum untuk menjadikan syariat Islam sebagai alternatif menyelesaikan krisis.

Perihal Pemerintah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sedang menghadapi kasus *Buloggate* ketika itu (2001), beberapa KRK seperti Majelis Ta'lim Al-Ishlah, FPIS, Brigade Hizbullah, GPK, Barisan Bismillah, dan Laskar Hizbullah Sunan Bonang tidak mempersoalkan. Laskar Jihad, sebagaimana FKAM/Jundullah, hanya menjadi penonton antara pendukung Gus Dur (Pasukan Berani Mati) dengan yang menolak Gus Dur (Jundullah Ikhwanul Muslimin) untuk bertahan sebagai presiden setelah Memorandum II DPR atas kasus *Buloggate*. Sedangkan, KAMMI mendukung Gus Dur untuk mundur dari jabatan sebagai presiden (hal. 116-117).

Kasus *sweeping* terhadap warga negara Amerika Serikat (AS) di Surakarta yang dilakukan FPIS menekankan agar pemerintah AS tidak banyak campur tangan dalam urusan Indonesia. Kasus Ambon dan Palestina dijadikan sebagai bukti FPIS bahwa AS terlibat di dalamnya (hal. 107). Reaksi terhadap pemboman Afghanistan oleh angkatan perang AS pada bulan Ramadhan, menyusul peristiwa serangan 11 September 2001 atas WTC New York dan Pentagon dilakukan FPIS. FPIS—juga gerakan Islam di kota lainnya terutama Jakarta—melakukan konvoi berkeliling kota Surakarta untuk menyerukan sikap anti Amerika, di samping mengingatkan para pemilik tempat-tempat hiburan agar mereka tidak menyelenggarakan acara yang berbau maksiat selama bulan Ramadhan.

Sikap anti AS lainnya ditampilkan Laskar Jihad, yang menyebut Amerika adalah sebagai Zionis, sedangkan Zionis adalah musuh Islam. Keburukan pemerintah AS adalah standar ganda yang mereka terapkan terhadap muslimin. Ini dibuktikan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana lebih dari 400 resolusi PBB yang menentang pendudukan Israel atas Palestina diveto oleh AS. Demikian pula perlakuan AS terhadap rakyat Irak yang dibiarkan kelaparan dengan sejumlah embargo ekonomi. Pengaruh AS, menurut Laskar Jihad telah merasuk ke Indonesia terutama saat krisis ekonomi dengan menghembuskan angin disintegrasi. Menurut Laskar Jihad, konflik Maluku adalah contoh yang terang atas keterlibatan AS sehingga diberlakukan darurat sipil di sana (hal. 110-111).

Kasus lainnya yang menjadi perhatian KRK di Surakarta, adalah “kaset Kristenisasi” yang dilakukan Ahmad Wilson. Kasus Ahmad Wilson dianggap sangat menyinggung umat Islam karena melakukan penyebaran agama dengan pembagian kaset secara gratis kepada orang yang telah jelas keberagamaannya

oleh LPMI. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam agama, walaupun bukan dalam bentuk peniksaan fisik (hal. 87-89).

Dari sejumlah aktivitas dan motif-motif gerakan KRK di Surakarta itu, para penulis masih mempertahankan kategorisasi antara muslim santri modernis dan tradisional dengan KRK tersebut. Menurut muslim santri modernis ada kesamaan di antara mereka dengan KRK dalam beberapa hal, misalnya (1) penolakan terhadap hermeneutika teks al-Qur'an dan hadith Nabi dan karena itu memahami "apa adanya"; (2) penolakan terhadap pluralisme, karena umat Islam adalah satu (*ummatan wahidah*); (3) konsekuensi logis dari (1) dan (2) adalah penolakan terhadap historisitas dan sosiologis, yang benar dan hak menurut mereka adalah kaum salaf; (4) oposisionalisme terhadap ancaman yang dapat menggoyang eksistensi agama, termasuk simbol-simbol agama (hal. 129-130).

Bagi masyarakat muslim santri tradisional, aktivitas yang dilakukan oleh KRK dinilai tidak sesuai dengan prinsip dakwah yang bijaksana. Masyarakat muslim santri tradisional berpendirian bahwa untuk mengajak kebenaran melalui tiga cara, yaitu (a) dakwah yang bijaksana, (b) pengajian dan pengkajian, dan (c) diskusi ilmiah. Dari ketiga cara itu, KRK tidak sejalan dengan ketiga cara di atas, sehingga aktivitas KRK dapat menyebabkan orang "menjauh" dari Islam. Aktivitas KRK dianggap berlebihan sehingga mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan. Di sini, muslim santri tradisional memetakan aktivitas (dakwah) mereka untuk masyarakat pedesaan dan *wong cilik*, sedangkan lahan KRK adalah masyarakat kota dan para pejabat (hal. 130).

Radikalisme sebagai sebuah ekspresi pemahaman dan keyakinan terhadap suatu ide sering dijumubuhkan dengan sebutan-sebutan seperti fundamentalisme dan ekstrimisme. Sebutan radikalisme tersebut pada gilirannya melahirkan stigma-stigma yang melekat di dalamnya, seperti fanatik, ekstrim, tertutup dan pada tahap tertentu memilih jalan kekerasan untuk mengekspresikan cita-citanya. Kupasan KRK di Surakarta yang ditampilkan dalam buku ini pun tidak luput dari stigma tersebut. Jika pada masa rezim Suharto radikalisme Islam sama berbahayanya dengan komunisme, maka pada masa pasca rezim Suharto radikalisme Islam sama artinya dengan pemberlakuan syariat Islam yang dianggap dapat merugikan masyarakat non-muslim. Hal ini terbukti dengan makin gencarnya suara untuk kembali ke Piagam Jakarta dari sejumlah organisasi Islam seperti FPI, PPMI, KISDI, dan Hizbut Tahrir, pada setiap Sidang Tahunan MPR.

Kehadiran organisasi-organisasi Islam, yang disebut para penulis buku ini sebagai KRK, menunjukkan bahwa wacana gerakan Islam tidak lagi didominasi kelompok *mainstream* seperti Muhammadiyah dan NU, dan beberapa

**RALAT**

Terdapat kekeliruan penomoran untuk edisi sebelumnya, tertulis **Vol. II, No. 2, Januari 2002**, seharusnya, **Vol. I, No. 2, Januari 2002**.

*Redaksi*

kelompok lainnya seperti ICMI ataupun PPP. Terdapat varian dalam gerakan Islam, mulai dari yang radikal dalam aksi seperti Laskar Jihad (hal. 60) hingga yang tidak termasuk radikal dalam tindakan tapi radikal secara konseptual seperti KAMMI (hal. 163).

Upaya para penulis buku ini untuk menampilkan KRK secara objektif, mengingat buku ini mula-mula sebagai sebuah hasil penelitian, patut dihargai. Selain berhasil menyajikan konteks lokal keberadaan KRK dengan isu-isu yang dihadapinya, para penulis juga menyodorkan kemungkinan di masa depan bagi KRK tersebut sehingga dapat diterima visi, misi dan tujuannya oleh masyarakat luas yang plural agama dan etnik. Sekalipun demikian, sekali lagi para penulis masih "terperangkap" dengan stigma-stigma yang melekat di dalam istilah "radikalisme", yang selama ini dianggap lebih dekat dengan konteks sejarah perkembangan Kristen di Barat, yang dijumpuhkan dengan fundamentalisme Kristen.

Pada bagian lain, para penulis tidak mencoba membandingkan fenomena KRK di tempat lain, sehingga radikalisme keagamaan tersebut tidak akan menggiring pembaca pada kesimpulan bahwa KRK itu khas Surakarta. Selain itu, sebagai sebuah karya penelitian yang menjelaskan fenomena radikalisme keagamaan di Surakarta, buku ini akan makin lengkap jika membandingkan perbedaan antara radikalisme keagamaan dengan radikalisme pada periode sebelumnya di Surakarta atau di tempat lain di Indonesia. Sebagai contoh, karya Takashi Siraishi (*Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, alih bahasa oleh Hilmar Farid dari *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926* [1990], Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 1997); atau pun karya Sartono Kartodirdjo (*Pemberontakan Petani Banten 1888*, terjemahan dari *The Peasant Revolt of Banten in 1888: It Conditions, Course and Sequel. A Case Study of Social Movement in Indonesia* [1966], Jakarta: Pustaka Jaya, 1984).

Bagaimanapun, buku ini patut dibaca para pemerhati sosial keagamaan. Dengan pembacaan yang jernih atas fenomena radikalisme keagamaan tersebut, diharapkan dapat menemukan makna radikalisme yang dilekatkan pada KRK-KRK khususnya di Surakarta.